



**MAKALAH
PENGANTAR ILMU SEJARAH**

**PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
(*COMPETENCY BASED TRAINING*)
MATA PELAJARAN SEJARAH SMA
TANGGAL 16 – 25 MARET 2015**

Disusun oleh :
Tim Pendidikan Sejarah

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengapa suatu bangsa atau masyarakat mengangkat sejarah sebagai satu bagian proses edukasi, baik secara formal maupun informal? Ada banyak jawaban dari pertanyaan ini. Jawaban yang sering dikemukakan adalah: pertama, bahwa sejarah diajarkan sebagai sarana pewarisan budaya dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mewujudkan penumbuhan jati diri generasi baru (generasi penerus). Kedua, pengajaran sejarah merupakan sumber nilai dan arena itu memberikan “moral precepts” yang mengatur dan mengikat kelakuan kelompok sehingga integritas kelompok terjamin kelangsungannya. Ketiga, pengajaran sejarah sebagai media penting untuk memahami masa lampau sebagai landasan timbulnya pengertian/pemahaman akan masa kini yang sekaligus menjadi bekal menghadapi masa yang akan datang (Widja, 2002: 56).

Landasan berpikir seperti di atas mengundang keragu-raguan di kalangan sejarawan. Dalam kerangka berpikir seperti ini sangat dimungkinkan muncul kecenderungan pemujaan yang berlebihan terhadap masa lampau yang pada gilirannya memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini. Pengaburan seperti ini bisa mendorong generasi baru hanya terpesona masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya. Seyogyanya pengajaran sejarah mengedepankan pengembangan kemampuan nalar.

Kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran Pengantar ilmu Sejarah adalah memahami kedudukan sejarah sebagai ilmu yang menjadi dasar memahami proses sejarah dan bekal memasuki bidang teori serta kajian sejarah. Dilihat dari sisi keilmuan, pembelajaran Pengantar Ilmu Sejarah sangat strategis. Melalui pembelajaran ini pemerhati sejarah “diantarkan” untuk memasuki seluk beluk keilmuan sejarah. Pada pembelajaran diperkenalkan konsep-konsep dasar yang menjadi unsur-unsur penting bangunan keilmuan sejarah.

Pengajaran sejarah seyogyanya tidak lagi terlalu menekankan hafalan fakta serta afektif doktriner, tetapi lebih syarat dengan latihan berpikir historis kritis analitis. Dengan pendekatan ini siswa dibiasakan untuk melihat/menerima gambaran sejarah dengan logika historis kritis, sehingga tidak harus dituntun oleh guru dalam memaknai

berbagai peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Di sinilah pentingnya buku ini. Dengan mengkaji secara kritis buku ini diharapkan pembaca memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan, sehingga pada saatnya nanti akan tumbuh kemampuan analitis dalam menyingkapi dinamika masyarakat pada masa lampau.

Pengajar sejarah perlu disediakan porsi yang lebih banyak untuk membiasakan membahas berbagai tulisan, atas dasar logika historis yang kokoh. Dengan cara ini guru menjadi terbiasa berhadapan dengan berbagai karya sejarah dengan berbagai visi yang melatarbelakanginya. Hasil yang bisa diharapkan dari pendekatan ini adalah tumbuhnya kemampuan/ketrampilan untuk menghadapi kenyataan bahwa karya sejarah cenderung mengandung nuansa subjektif. Dengan demikian guru sejarah mampu membedakan karya sejarah yang kuat logika historisnya serta kokoh fakta pendukungnya dengan yang bengkok (Widja, 2002: 4).

B. Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada pemerhati sejarah, khususnya guru sejarah, tentang konsep-konsep dasar dalam Ilmu Sejarah sebagai bekal mencermati proses sejarah.
2. Memberikan pemahaman kepada pemerhati sejarah, khususnya guru sejarah, agar mampu berpikir kritis analitis dalam menyikapi dinamika masyarakat pada masa lampau.
3. Memberikan dorongan dan rangsangan kepada pemerhati sejarah, khususnya guru sejarah, untuk mengkaji berbagai karya sejarah sehingga terbiasa dengan perbedaan visi di antara sejarawan.

C. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam buku ini sengaja dibatasi dengan tema-tema yang menjadi bagian mendasar dari kedudukan sejarah sebagai ilmu. Akan tetapi, tidak seluruh topik yang biasa disajikan dalam Matakuliah Pengantar Ilmu Sejarah di Perguruan Tinggi disajikan dalam buku ini. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, antara lain keterkaitan kedalaman dan keluasan materi dengan alokasi waktu yang tersedia dalam kegiatan pelatihan. Berturut-turut dalam buku ini akan dibahas topik-topik sebagai berikut.

1. Konsep Dasar Sejarah
2. Dimensi sejarah

3. Sumber dan Periodisasi Sejarah
4. Penelitian Sejarah

BAB II

KONSEP DASAR SEJARAH

Kata sejarah diambil dari bahasa Arab “syajaratun” yang artinya pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu “syajarah”, akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia (Frederick dan Soeri Soeroto, 1982: 1). Jadi kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan geneologis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang serta ranting-rantingnya serta ke bawah juga menggambarkan percabangan dari akar-akarnya. Dengan demikian kata syajarah itu mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah/ keturunan (Widja, 1988: 6). Memang kalau kita perhatikan historiografi tradisional kebanyakan intinya memuat asal usul keturunan (silsilah). Kata-kata seperti kisah, hikayat, tambo, riwayat, tarikh adalah istilah yang sering dipakai untuk gambaran asal-usul tersebut. Dalam bahasa Jawa dikenal babad, kidung, pamancangah adalah juga mengandung di dalamnya unsur silsilah, meskipun sering dirangkai juga dengan gambaran kejadian/peristiwa.

Di negeri Barat dikenal istilah dalam bahasa Inggris “history”. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno “istoria” yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya (Widja, 1988: 7). Kalau pengertian ini diluaskan artinya, hakikatnya sudah mengacu pada pengertian ilmu. Pada mulanya belum kelihatan adanya usaha membatasi pengertian pada gejala yang menyangkut kehidupan manusia saja, tapi mencakup gejala alam secara keseluruhan. Dalam perkembangan kemudian baru kelihatan munculnya dua istilah yaitu **scientia** yang lebih mengkhusus pada penelaahan sistematis yang sifatnya non kronologis atas gejala alam, sedangkan kata **istoria** lebih dikhususkan bagi penelaahan kronologis atas gejala-gejala yang menyangkut kehidupan manusia.

Dengan demikian terdapat perbedaan makna antara kata sejarah dan history. Pada istilah sejarah (yang tradisional) terkandung usaha mengabadikan/menjunjung kebesaran penguasa atau cikal bakal kelompok orang dengan menekan terutama unsur asal usul keturunan serta peristiwa yang menyangkut tokoh-tokoh tersebut dan biasanya diuraikan secara magis-religius. Sedangkan pada istilah history, tekanan pengertian diletakkan pada usaha untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebelum kehidupan kita, atau keinginan untuk mengetahui perjalanan waktu (Widja, 1988: 7). Dalam hubungan ini terlihat di Barat pengertian history dari semula sudah menunjuk pada unsur-unsur keilmuan.

A. Konsep-konsep Pembangun Ilmu Sejarah

1. Manusia

Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Akan tetapi, manusia bukan monopoli kajian sejarah. Ilmu-ilmu lain, seperti Sosiologi, Antropologi, Politik, Kedokteran, dan sebagainya, juga mengkaji tentang manusia. Perbedaannya terletak pada titik perhatian masing-masing ilmu. Sejarah mengkaji aktivitas manusia di segala bidang dalam perspektif waktu. Akan tetapi, sejarah juga bukan kisah manusia pada masa lampau secara keseluruhan. Manusia yang sudah memfosil menjadi objek kajian Antropologi Ragawi. Demikian juga benda-benda, meskipun sebagai hasil karya manusia, tetapi menjadi bidang kajian Arkeologi.

2. Waktu/Temporal

Menurut Kuntowijoyo (1995), dalam waktu terjadi empat hal, yaitu (1) perkembangan, (2) kesinambungan, (3) pengulangan, (4) perubahan. Perkembangan terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks. Contoh : masyarakat kota Surabaya tahun 1920-an berbeda dengan masyarakat kota Surabaya tahun 1990-an. Kesinambungan bila masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contoh: pada awal-awal Proklamasi Kemerdekaan kondisi yang ada merupakan kesinambungan dari masa-masa sebelumnya, sehingga di tempat-tempat tertentu masyarakat tidak sabar untuk melakukan perubahan, seperti di Aceh dan Tiga Daerah (Brebes, Tegal, Pekalongan). Pengulangan berlangsung bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi, sehingga timbul kemiripan. (Selanjutnya akan dibahas pada bagian Sejarah Tidak Berulang). Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami perkembangan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Contoh: pendidikan dan pengajaran mengubah struktur masyarakat Jawa pada awal abad ke-20.

3. Ruang/Spasial

Dalam melakukan aktivitas, manusia terikat pada ruang atau tempat tertentu. Ibarat bermain sandiwara, ruang adalah panggung, di mana lakon dimainkan. Ada hubungan yang erat antara peristiwa dengan ruang, seperti dinyatakan dalam teori

Determinisme Geografis, bahwa faktor geografis sebagai satu-satunya faktor penentu jalannya peristiwa sejarah (Selanjutnya lihat Kausalitas).

4. Peristiwa

Sejarawan terutama tertarik pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti istimewa. Untuk itu, Reiner (1997:99) membedakan apa yang disebut *occurrence* dengan *event*. *Occurrence* menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan *event* merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian “non historis” untuk peristiwa biasa, dan kejadian “historis” untuk peristiwa istimewa (Widja, 1988: 18).

Masalahnya, sulit membuat batasan yang ketat, mana yang dikategorikan sebagai kejadian biasa dan mana yang merupakan kejadian istimewa. Perbedaan ini sebenarnya lebih banyak bergantung pada kepentingan sejarawan dalam menyusun cerita sejarahnya. Ada yang mula-mula dianggap sebagai kejadian/peristiwa biasa, mungkin kemudian dapat menjadi peristiwa istimewa. Demikian sebaliknya, peristiwa yang mula-mula dianggap istimewa ternyata bisa kurang berarti dalam konteks cerita sejarah yang lain. Maka dari itu, sejarawan dianjurkan untuk tidak terlalu terikat pada klasifikasi di atas. Dalam hal ini, yang penting sejarawan perlu mengumpulkan sejumlah besar peristiwa yang menarik perhatiannya, dan baru kemudian pada waktu ia merencanakan karakteristik cerita sejarahnya, menyeleksi/mengklasifikasi mana-mana yang bersifat peristiwa biasa dan mana-mana yang merupakan peristiwa istimewa dalam konteks ceritanya (Widja, 1988: 18). Dengan demikian, pengertian peristiwa istimewa itu hakikatnya dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang terutama menunjang bagi karakteristik cerita sejarah yang hendak disusun oleh sejarawan atau peristiwa yang mempunyai makna sosial.

5. Kausalitas

Apabila pengungkapan sejarah bersifat deskriptif, maka fakta-fakta yang perlu diungkapkan terutama bersangkutan dengan **apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana**. Dengan mengetahui data deskriptif itu sebagian besar dari keingintahuan terhadap peristiwa sejarah tertentu terpenuhi. Dalam jawaban terhadap bagaimananya peristiwa itu, pada umumnya telah tercakup beberapa keterangan tentang sebab-sebabnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit,

hanya secara implisit saja. Seringkali pembaca sudah puas dengan uraian mengenai bagaimananya itu.

Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas masih disusul dengan pertanyaan **mengapa**, maka timbul tuntutan untuk secara eksplisit memberikan uraian tentang sebab-sebab atau kausalitas peristiwa itu.

Sejak abad ke-19 muncul teori **deterministik**. Teori ini menjelaskan, bahwa kausalitas suatu peristiwa, keadaan atau perkembangan dikembalikan kepada satu faktor saja (Kartodirdjo, 1992: 94). Faktor itu dipandang sebagai faktor tunggal atau satu-satunya faktor yang menjadi faktor kausal. Determinisme geografis berpandangan bahwa faktor lokasi yang menentukan situasi atau perkembangan suatu bangsa. Bangsa-bangsa di negeri dingin pada umumnya maju oleh karena kondisi ekologi yang menuntut jiwa yang mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kondisi alamiah yang berat. Sebaliknya, di negeri panas (tropika) alam sangat memudahkan hidup sehingga tidak banyak menimbulkan tantangan berat. Determinisme rasial lebih menekankan faktor biologis sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Determinisme ekonomi adalah diterminan dari struktur dan perkembangan masyarakat. Teori Karl Marx terkenal sebagai determinisme ekonomis. Seluruh lembaga-lembaga sosial, politik, dan kultural ditentukan oleh proses ekonomi pada umumnya dan sistem produksi khususnya. Misalnya, sistem produksi agraris dengan teknologi tradisional menciptakan struktur politik dan sosial yang feodalistik sifatnya, yang kesemuanya berkisar sekitar hubungan antara tuan tanah dan penggarap atau buruh tani.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu-ilmu sosial khususnya melahirkan teori **perspektivisme**. Walaupun tidak berhasil seluruhnya teori ini mendesak teori determinisme. Perspektivisme adalah pandangan atau visi terhadap permasalahan atau objek pengkajian yang mendekati dari berbagai segi atau aspek dan perspektif. Timbulnya perspektivisme disebabkan oleh semakin luasnya kesadaran bahwa berbagai gejala tidak dapat lagi dipandang sebagai sesuatu yang sederhana tetapi bersifat kompleks. Menurut Kartodirdjo (1992) kompleksitas hanya dapat dikupas dan dianalisis berbagai unsur dan aspeknya, dengan pendekatan dari berbagai perspektif, antara lain perspektif ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Istilah lain dari perspektivisme adalah multikausalitas.

Teori berikutnya dikenal dengan **motivasi pribadi**. Kausalitas dalam tindakan individual biasanya dikembalikan kepada motivasi. Motivasi sangat

ditentukan oleh nilai-nilai atau norma-norma, yang keduanya merupakan faktor kultural yang berfungsi sebagai prinsip atau dasar hidup dan yang melandasi kelakuan. Ternyata kelakuan individual senantiasa berpedoman pada nilai. Apabila kelakuan telah membudaya menurut pola tertentu sesuai dengan orientasi nilai dan diekspresikan sebagai sikap dan konsistensi dalam bertindak serta berkelakuan, maka akan membentuk watak tertentu dan akhirnya menjadi kepribadian. Oleh karena banyak peristiwa sering berkisar pada seorang pribadi beserta peranannya, maka cara melacak kausalitas sering dikembalikan kepada faktor-faktor kepribadian seseorang.

6. Tidak Berulang

Sejarah bersifat tidak berulang (*einmalig*). Kalau terdapat dua peristiwa atau lebih yang mempunyai kesamaan, bukan berarti sejarah berulang. Hal ini hanya sebuah kemiripan, karena unsur-unsur yang melekat dalam masing-masing peristiwa (waktu, pelaku, tempat, kausalitas) berbeda. Contoh berikut kiranya dapat memperjelas hal ini.

PKI terlibat perlawanan pada tahun 1927, 1948, dan 1965. Dari aspek waktu, tokoh-tokoh yang terlibat, intensitas keterlibatan, tempat perlawanan, jelas berbeda, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain.

B. Pengertian Negatif

Kuntowijoyo (1995: 7-12) memaparkan pengertian negatif sejarah sebagai berikut.

1. Sejarah Bukan Mitos

Sama-sama menceritakan masa lalu sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lalu dengan: (1) waktu yang tidak jelas, dan (2) kejadian yang tidak masuk akal bagi orang masa kini. Mitos bersama nyanyian rakyat, mantra, syair dan pepatah termasuk tradisi lisan. Tradisi lisan itu dapat menjadi sejarah, asal ada sumber sejarah lain. Barangkali untuk masyarakat yang belum mengenal tulisan, orang akan mengandalkan diri pada tradisi lisan dalam penulisan sejarah. Pada hakikatnya semua sumber sah sifatnya, asal prosedur penelitian sejarah diterapkan.

2. Sejarah Bukan Filsafat

Filsafat sifatnya abstrak dan spekulatif, dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Kalau sejarah berbicara tentang manusia, maka yang

dibicarakan ialah orang tertentu yang mempunyai tempat dan waktu serta terlibat dalam kejadian. Filsafat sebaliknya, kalau berbicara tentang manusia, maka manusia itu ialah manusia pada umumnya, manusia yang ada dalam gambaran angan-angan. Ada dua kemungkinan penyalahgunaan sejarah oleh filsafat; (1) sejarah dimoralkan, dan (2) sejarah sebagai ilmu yang kongkrit dapat menjadi filsafat yang abstrak.

3. Sejarah Bukan Ilmu Alam

Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, yang dalam perjalanan waktu dipecah ke dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Ilmu-ilmu manusia dibedakan dengan ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam bertujuan menemukan hukum-hukum yang berlaku umum, atau bersifat **nomothetis**, sedangkan sejarah berusaha mendeskripsikan hal-hal yang khas, atau **idiografis**.

4. Sejarah Bukan Sastra

Sejarah berbeda dengan sastra setidaknya dalam empat hal: (1) cara kerja, (2) kebenaran, (3) hasil keseluruhan, dan (4) kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Kebenaran bagi pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya, dengan kata lain pengarang akan bersifat subjektif dan tidak ada yang mengikatnya. Kebebasan bagi pengarang demikian besarnya, sehingga ia berhak membangun sendiri dunianya. Hasil keseluruhan hanya menuntut supaya pengarang taat asas dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Dalam kesimpulan, sastra bisa berakhir dengan sebuah pertanyaan. Sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya, setuntas-tuntasnyanya, dan sejelas-jelasnya.

C. Membangun Definisi Sejarah

Dengan memperhatikan dan memahami konsep-konsep di atas, maka siapa pun dapat membuat definisi sejarah, tanpa harus menghafal dari sebuah definisi yang dibuat oleh orang lain. Penyusun definisi tinggal menyusun konsep-konsep di atas dalam suatu urutan yang logis dan sistematis. Sebagai contoh:

Sejarah adalah studi keilmuan tentang peristiwa masa lalu manusia pada tempat tertentu yang tidak berulang dan bukti-buktinya dapat ditemukan.

BAB III

DIMENSI SEJARAH

A. Sejarah Sebagai Ilmu

Dalam dunia ilmu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebuah ilmu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Objek

Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia, bedanya sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Selanjutnya objek sejarah dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumber-sumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau (Zed, 2002: 48). Bukti-bukti itu merupakan kesaksian sejarah yang bisa dilihat. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya.

2. Tujuan

Menurut Sutrasno (1975: 22) sejarah bertujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceritakan segala yang terjadi apa adanya.
- b. Membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis.

Makin objektif (makin dekat kepada kenyataan sejarah yang sesungguhnya) makin baik, karena dengan demikian pembaca akan mendapat gambaran sesungguhnya tentang apa yang benar-benar terjadi.

3. Metode

Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Pembahasan selanjutnya tentang metode sejarah lihat BAB V). metode sejarah bersifat universal, artinya metode sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka

semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, dalam sejarah terdapat metode sejarah lisan, kwantohistori yang dekat dengan statistik, psikohistori, dan sebagainya.

4. Kegunaan

Menurut Widja (1988: 49-51) sejarah paling tidak mempunyai empat kegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. **Guna edukatif** adalah sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang mempelajarinya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Selanjutnya berarti bahwa kita bisa mengambil dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep-konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan-harapan di masa akan datang.

Guna inspiratif terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa. Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan *nation building*. Di negara-negara yang sedang berkembang guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif.

Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk “pesona perlawatan”. Dengan membaca sejarah seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini.

Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan/ketrampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya.

Kuntowijoyo (1995: 19-35) membedakan guna sejarah menjadi guna ekstrinsik dan guna intrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi, (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik merupakan manfaat sejarah terutama di bidang pendidikan. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, (8) ilmu bantu. Dalam

guna ekstrinsik selain pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (1) latar belakang, (2) rujukan, dan (3) bukti.

5. Sistematika

Bentuk sistematika dalam sejarah berupa periodisasi dan percabangan dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu. (Pembahasan selanjutnya tentang periodisasi lihat BAB IV). Secara garis besar materi sejarah dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok teori sejarah dan kelompok kajian sejarah. Kelompok teori sejarah, seperti Pengantar Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Metodologi dan Historiografi. Kelompok kajian sejarah masih terbagi lagi dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia dan sejarah tematis. Masing-masing masih terpecah dalam cabang-cabang lagi, seperti sejarah tematis terdiri atas sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah maritim, dan sebagainya.

6. Kebenaran

Sedikitnya ada dua teori kebenaran yang biasanya bisa dikaitkan dengan usaha pengujian kebenaran fakta, yaitu kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Kebenaran **korespondensi** menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila sama dengan realitasnya. Apa yang disebut realitas dalam konteks sejarah adalah kenyataan yang benar-benar telah terjadi, suatu kenyataan seperti apa adanya yang tidak tergantung pada orang yang menyelidikinya. Sedangkan kebenaran **koherensi** menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar jika cocok dengan pernyataan-pernyataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan kita terima kebenarannya. Jadi, kebenaran itu tidak dicari dalam hubungan pernyataan dengan realitas, tapi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya.

Oleh karena sejarah terjadi satu kali, pada masa lampau, dan tidak bisa diulang, maka dari dua teori kebenaran itu, teori kebenaran koherensi yang tepat bagi sejarah.

7. Generalisasi

Generalisasi atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan biasanya tidak menjadikan generali-

sasi sebagai tujuan utamanya. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan, untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu (Widja, 1988: 3).

Akan tetapi, banyak juga sejarawan yang membicarakan sifat-sifat umum, di samping juga kekhususan, dari masing-masing revolusi, seperti revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, dan sebagainya. Demikian juga Kartodirdjo (1984) telah berhasil memberikan generalisasi tentang gerakan-gerakan protes di Jawa.

8. Prediksi

Prediksi dapat diartikan sebagai berlakunya hukum dikemudian hari. Hukum sejarah adalah keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian, yang memberikan rupa persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Dalam sejarah keteraturan yang menjadi unsur utama dari suatu hukum dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, yaitu sepanjang keteraturan itu bisa diserap pada sejumlah kejadian yang berarti pula tidak ada jaminan bahwa keteraturan itu bisa diterapkan pada setiap kejadian, dan bahwa kejadian-kejadian itu dibatasi hanya kejadian yang punya rupa persamaan, bukan kejadian yang memang benar-benar sama (identik). Dengan kata lain, hukum itu berlaku apabila bisa dilihat unsur-unsurnya pada peristiwa, kalau tidak maka berarti hukum itu tidak berlaku.

Kenyataan ini tidak menghalangi usaha untuk memproyeksikan pengalaman masa lampau ke situasi masa kini dan akan datang. Meskipun tidak dengan landasan prediksi seperti yang terjadi dalam ilmu alam.

Catatan:

Semua persyaratan ilmu seperti di atas telah terpenuhi oleh sejarah, sehingga tidak perlu diragukan lagi kedudukan sejarah sebagai ilmu. Masalah yang sering timbul justru menempatkan sejarah dalam rumpun keilmuan. Sebagian orang menempatkan sejarah sebagai ilmu sosial dan sebagian lagi menempatkan sebagai ilmu humaniora.

B. Sejarah Sebagai Seni

Menurut Kuntowijoyo (1995: 67-70) kedudukan sejarah sebagai seni disebabkan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Sejarah memerlukan intuisi

Apa yang harus dikerjakan setiap langkah memerlukan kepandaian sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Sering terjadi untuk memilih suatu penjelasan, bukan peralatan ilmu yang berjalan tetapi intuisi. Dalam hal ini cara kerja sejarawan sama dengan seniman.

Sering sejarawan merasa tidak lagi sanggup melanjutkan tulisannya, terutama kalau itu berupa deskripsi atau penggambaran peristiwa. Dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya yang diperlukan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Di sinilah beda intuisi seorang sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya.

2. Sejarah memerlukan imajinasi

Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebelumnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Pikiran sejarawan harus mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks jaman di mana peristiwa terjadi. Tentu saja imajinasi sejarawan harus tetap berdasar pada bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme.

3. Sejarah memerlukan emosi

Sejarawan diharapkan menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Akan tetapi, sejarawan harus tetap setia dengan fakta. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal *historical thinking* atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. *Historical thinking* didasari bahwa peristiwa sejarah mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar peristiwa adalah bentuk dari peristiwa, seperti pemberontakan, perubahan sosial, pelacuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek dalam merupakan pikiran-pikiran dari pelaku sejarah. Untuk dapat menjangkau

pikiran-pikiran ini dilakukan dengan percakapan imajiner. Tentu saja sejarawan tidak boleh berbuat semuanya saja, harus tetap bertumpu pada fakta sejarah. Dengan penerapan *historical thinking* diharapkan muncul emosi kesejarahan.

4. Sejarah memerlukan gaya bahasa

Gaya bahasa yang baik, tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Akan tetapi perlu diingat, seperti dinyatakan Kuntowijoyo (1995: 11) bahwa sejarah bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra dalam hal: (1) cara kerja, (2) kebenaran, (3) hasil keseluruhan, dan (4) kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Kalau kebetulan pengarangnya bersimpati pada perkembangan kota, ia akan menghasilkan sastra yang demikian. Tidak perlu diharapkan pengarang akan mengungkapkan secara tuntas. Kebenaran bagi pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain pengarang akan bersikap subjektif dan tidak ada yang mengikatnya. Kebebasan bagi pengarang demikian besarnya, sehingga berhak membangun sendiri dunianya. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat asas dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Dalam kesimpulan, bisa saja sastra justru berakhir dengan pertanyaan. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh sejarah. Sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya, setuntas-tuntasnya, dan sejelas-jelasnya.

C. Sejarah Sebagai Peristiwa dan Kisah

Kisah (tulisan) sejarah

Sintesis

Fakta

Peristiwa Sejarah

Evidensi

Sejarah sebagai peristiwa hanya terjadi satu kali pada masa lampau. Orang masa kini mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa melalui bukti-bukti (evidensi) yang ditinggalkan. Bagi sejarawan bukti-bukti merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Tanpa adanya bukti peristiwa masa lalu hanya mitos belaka. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti-bukti itu selanjutnya diolah melalui kritik sejarah. Hasil upaya mempertanyakan bukti-bukti disebut fakta sejarah. Jadi, fakta dalam ilmu sejarah berarti informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber atau bukti setelah melalui proses kritik.

Deretan fakta-fakta belum dapat disebut sejarah, melainkan masih *pseudo sejarah* (sejarah semu) dan belum mempunyai arti. Agar dapat berarti dan dipahami maka perlu dilakukan sintesis (interpretasi). Ketika hasil sintesis dituliskan maka lahirlah sejarah sebagai kisah. Dengan demikian sejarah sebagai kisah, merupakan produk serangkaian kerja intelektual dari seorang sejarawan dan bagaimana menangani bukti-bukti hingga mewujudkannya dalam tulisan sejarah (historiografi).

BAB IV

SUMBER DAN PERIODISASI SEJARAH

A. Sumber Sejarah

Sutrasno (1975:43) mendefinisikan sumber sejarah sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai bahan penulisan atau penceriteraannya kembali sejarah. Sedangkan Widja (1988:19) mengartikan sumber sejarah sebagai apa-apa yang ditinggalkan oleh peristiwa masa lampau yang menunjukkan bahwa benar-benar telah ada peristiwa. Sebagian sejarawan lebih senang menggunakan istilah jejak sejarah (*traces/relics*) atau bukti-bukti sejarah untuk bahan yang sangat penting artinya bagi penyusunan cerita sejarah itu.

Mengingat peristiwa masa lampau manusia meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang bervariasi dalam berbagai jenis aktivitas (politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain), maka jejak yang ditinggalkan sejarah itu pun beraneka ragam pula wujudnya. Sesuai dengan sifat-sifat aktivitas manusia tersebut, maka biasanya jejak-jejak tersebut dikelompokkan dalam berbagai macam klasifikasi.

Klasifikasi yang paling sederhana adalah pembagian berupa sumber-sumber yang ditinggalkan **tidak dengan sengaja** oleh manusia dalam kegiatan sehari-harinya, dan jejak yang dengan **sengaja** memang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bagi generasi berikutnya mengenai tindakan orang-orang yang meninggal-kannya. Perbedaan yang demikian kelihatannya tidak mampu memberikan batasan yang cukup tegas antara yang tidak sengaja dengan yang sengaja. Misalnya, apakah Pyramid didirikan hanya sebagai kuburan raja-raja (tidak sengaja memberi pesan) atau memang sengaja untuk menunjukkan kemampuan orang-orang pada jaman itu dalam bidang seni bangun dan kehebatan kekuasaan raja-rajanya. Demikian juga mengenai diary (buku harian), apakah memang dimaksudkan untuk kenang-kenangan bagi anak cucunya atau hanya sekedar sebagai cetusan hati untuk kepentingan sipembuat diary tersebut.

Berkaitan dengan sumber yang tidak disengaja dan sumber yang sengaja, Sutrasno (1975:43) lebih lanjut menguraikan:

Memberi tinggalan secara sadar artinya, manusia dengan sadar meninggalkan apa-apa kepada anak cucunya. Dibuatnya candi yang megah dan tahan lama, agar anak cucunya nanti dapat menghormati dewa yang dipuja di candi tersebut. Ditinggalkan pusaka-pusaka, agar anak cucunya tetap memiliki kekuatan orang tuanya. Membuat peraturan-peraturan yang ditulis di batu, agar rakyat dapat melihatnya dan mematuhi dalam jangka waktu yang lama, dan

masih banyak lagi yang kemudian ditemukan kembali oleh sarjana sejarah (atau yang lain) dalam keadaan utuh, setengah utuh, atau rusak. Memberikan tinggalkan dengan tak sadar, artinya karena tidak mereka sengaja. Biasanya terserak. Pada umumnya berupa alat-alat kebutuhan hidup, alat-alat senjata, alat masak, perhiasan. Benda-benda itu mereka tinggalkan begitu saja, dan membuatnya pun sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup belaka.

Ada pula yang membagi sumber sejarah menjadi **non historis** dan **historis**. Sumber non historis adalah jejak yang tidak menarik perhatian sejarawan karena tidak langsung berkaitan dengan cerita sejarah yang hendak disusunnya. Sedangkan sumber historis merupakan jejak atau sumber yang bisa menuntun sejarawan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau. Meskipun klasifikasi ini harus diterima sebagai sesuatu yang relatif, tapi lebih mudah diaplikasikan karena dikaitkan dengan kepentingan sejarawan dalam rangka penyusunan cerita sejarahnya. Selanjutnya sumber historis ini dibedakan lagi menjadi sumber yang bersifat non materiil dan sumber materiil (Reiner, 1961: 96-104). Sumber non materiil ialah sumber-sumber yang tidak nyata yang kadang-kadang masih hidup dalam masyarakat, seperti institusi-institusi sosial, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan sebagainya. Sumber materiil ialah objek-objek yang merupakan hasil dari aktivitas manusia yang hidup pada zaman lampau yang kadang-kadang masih berfungsi sampai sekarang seperti candi, masjid, makam, istana, dan sebagainya yang sering digolongkan secara keseluruhan dengan monumen-monumen. Sumber-sumber materiil lainnya adalah seperti alat-alat rumah tangga, potret, atau gambar, senjata, mata uang, prasasti, dan lain-lain.

Ada juga klasifikasi sederhana yang lain seperti yang dilakukan Notosusanto (1971:18), yaitu sumber **benda**, sumber **tertulis**, dan sumber **lisan**. Tentu saja yang terutama menarik perhatian sejarawan adalah sumber tertulis, karena sumber benda lebih menuntut keahlian khusus yang terutama dikuasai/dikembangkan oleh disiplin arkeologi. Sumber tertulis lebih lanjut dibedakan antara sumber resmi dengan sumber tak resmi serta sumber formal dan informal. Kedua macam klasifikasi ini dapat saling potong memotong. Ada dokumen resmi formal dan dokumen resmi informal. Ada pula dokumen tak resmi formal dan dokumen resmi informal. Keputusan presiden adalah dokumen resmi formal. Surat "Kattebellece" yang dibuat oleh seorang pejabat kepada pejabat yang lain adalah dokumen resmi informal, karena ditulis oleh seorang pejabat dan diperuntukkan kepada pejabat. Surat seorang pejabat sebagai pribadi kepada Kepala Sekolah di mana putranya bersekolah dan berisi hal ihwal tentang putranya itu merupakan dokumen tak resmi formal, karena ditulis sebagai pribadi akan tetapi ditulis

sebagai surat yang memenuhi syarat-syarat dari surat menyurat formal. Surat dari perjalanan seorang pejabat kepada istrinya merupakan dokumen tak resmi informil.

Sumber tak tertulis adalah semua peninggalan yang di dalamnya tak terdapat tulisan-tulisan. Benda-benda ini adalah hasil karya manusia pada masa itu. Dari sini dapat diketahui sampai di tingkat mana manusia itu hidup berbudaya, beserta perkembangannya, pengaruh kebudayaan luar, dan sebagainya. Atas dasar sumber ini kita dapat mengetahui sampai di mana pengaruh sesuatu kebudayaan memasuki suatu daerah, mengetahui jalur-jalur jalannya dan tersebarnya kebudayaan tersebut, dan dengan demikian pula dapat diketahui perkembangan politik dan kebudayaan pada suatu zaman.

Kecuali klasifikasi di atas, sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber langsung dan tak langsung. Sumber langsung artinya dengan sumber itu dapat dilihat bekas-bekas yang dibuat atau sebagai akibat dari perbuatan seseorang atau pemerintahan. Sumber tak langsung ialah segala tulisan yang dibuat oleh seseorang pada masa kejadian itu dan atau sesudahnya. Contoh sumber langsung seperti alat senjata, candi, prasasti, dan sebagainya. Contoh sumber tak langsung seperti kronik, majalah, babad dan sebagainya (Sutrasno, 1975).

Sumber langsung tingkat objektivitasnya lebih tinggi, tinggal bagaimana mencari hal-hal yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan gejala-gejala adanya peristiwa sejarah. Dengan sumber langsung itu dapat menganalisa dan membuat perhitungan-perhitungan (sudah barang tentu dengan sumber-sumber lain yang sejenis atau ada kaitannya), dan mungkin akan menemukan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya, sehingga dapat disusun cerita sejarah yang rasional dan objektif. Keberhasilan menggarap sumber langsung sangat bergantung pada kemampuan sejarawan sendiri.

Sumber tak langsung telah tersentuh campur tangan orang kedua, dan karenanya bukan tidak mungkin telah terpengaruh oleh subjektivitas. Seorang sejarawan harus dapat mengambil atau memisahkan sifat objektif dari yang subjektif. Akan tetapi bagi sumber sejarah kontemporer hal ini tidak mudah, karena bahan untuk menyusun informasi lebih banyak dan langsung.

Masih ada lagi klasifikasi yang perlu diketahui. Gottschalk (1983) membagi sumber sejarah menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain, atau dengan alat mekanis, hadir pada saat peristiwa terjadi. Sumber primer

disebut juga saksi pandangan mata. Sumber primer dihasilkan oleh orang yang sejaman dan setempat. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada saat peristiwa terjadi. Sumber sekunder digunakan untuk tujuan; (1) menjabarkan latar belakang yang cocok dengan bukti sejaman mengenai subjeknya, tetapi harus siap sedia untuk menyangsikan dan meluruskan sumber sekunder, bilamana suatu analisa kritis terhadap saksi-saksi sejaman memerlukan hal itu; (2) memperoleh petunjuk mengenai data bibliografis yang lain; (3) memperoleh kutipan atau petikan dari sumber dari sumber-sumber sejaman; (4) memperoleh intepretasi atau hipotesa mengenai suatu masalah. Contoh sumber primer adalah buku Adam Malik dan Sidik Kertapati mengenai saat-saat di sekitar proklamasi, karena kedua orang tersebut menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Sebaliknya kajian dari Banedict R.O.G Anderson adalah sumber sekunder.

B. Periodisasi Sejarah

Periodisasi berasal dari asal kata periode yang berarti masa, kurun, babak, dan zaman. Periode adalah satu kesatuan yang isi, bentuk, maupun waktunya tertentu (Gazalba, 1981: 75). Aktivitas masa lalu manusia beragam, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu, perlu dibagi-bagi ke dalam periode-periode agar mudah dipahami. Dalam periodisasi seolah-olah objek dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga merupakan kotak-kotak yang dibatasi oleh tembok tebal. Walaupun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ibarat tubuh manusia yang terdiri atas kepala, tangan, telinga, dan lain-lain, agar mudah memahami maka perlu dipelajari masing-masing anggota tubuh. Kajian masing-masing anggota tubuh manusia memang seolah-olah terpisah, tetapi sebenarnya tetap dalam satu kesatuan yaitu badan tubuh manusia.

Salah satu syarat ilmu adalah pembagian-pembagian yang bersifat teoritis. Hal ini dilakukan agar mudah mendalami persoalan bagian demi bagian. Walaupun hanya secara singkat dan global, namun dengan pembagian atau periodisasi diharapkan agar isi dan arti dari dasar ilmu pengetahuan dapat dimengerti oleh siapapun, khususnya yang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Sebagai contoh: periodisasi sejarah Indonesia, menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa Nirleka hingga masa kini, meskipun dalam pernyataan pendek-pendek.

Periodisasi masuk dalam penafsiran sejarah yang dibikin sejarawan. Periode yang merupakan kerangka sejarah adalah wujud dari tafsiran sejarawan. Periodisasi

adalah pendapat sejarawan tentang sejarah (Gazalba, 1981: 75). Meskipun periodisasi merupakan interpretasi sejarawan, namun sejarawan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut dalam menyusun periodisasi.

1. Apapun kriteria yang digunakan sebagai dasar pembagian (kronologis, wangsa/dinasti, ekonomi, ketatanegaraan, dll) selalu disertai dengan waktu. Oleh karena waktu merupakan cermin dari perkembangan, perubahan dan kontinuitas.
2. Periodisasi hanya bersifat teoritis, artinya pembuatan periodisasi dalam konteks keilmuan. Kenyataannya masa lampau tidak terbagi-bagi.
3. Periodisasi bersifat subjektif, karena merupakan tanggapan sejarawan terhadap aktivitas manusia. Dengan demikian siapa pun dapat menyusun periodisasi. Termasuk di sini guru-guru pengajar Mata Pelajaran Sejarah.
4. Batas antarperiode tidak tetap, seperti garis yang memisahkan laut dengan pantai. Kadang berkurang tetapi kadang lebih dari garis yang kita tentukan.
5. Pemanfaatan tahun dalam periodisasi hendaknya memakai tahun bulat atau abad. Hal ini dimaksudkan untuk mudah mengingat dan menampung tanggal batas yang berdekatan. Contoh: berakhirnya Sejarah Indonesia Lama dan dimulainya Sejarah Indonesia Baru adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan dalam periodisasi dipakai tahun bulat 1500. Hal ini tidak benar-benar tepat, sebab keruntuhan Majapahit dapat berasal dari Sengkalan "*Sirna Ilang Kertaning Bumi*" atau "*Sunyo Nora Yuganing Wong*" yaitu 1400 Saka atau 1478 M. Akan tetapi, sumber sejarah lain juga menyebut keruntuhan Majapahit adalah tahun 1527 M. Dengan demikian tahun 1500 mudah diingat dan dapat menampung tahun yang berdekatan (1478 M dan 1527 M).
6. Dalam menyusun periodisasi yang harus diperhatikan adalah pemakaian kriteria secara konsisten.

BAB V

PENELITIAN SEJARAH

Prosedur kerja seorang peneliti sejarah dalam mengkaji masa lampau berkisar pada langkah-langkah; (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan. Kelima langkah ini kemudian diringkas dalam empat kegiatan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Kuntowijoyo (1995: 90-92) menyarankan, sebaiknya topik atau objek kajian dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional, dan (2) kedekatan intelektual. Hal ini penting karena orang akan bekerja dengan baik bila senang dan mampu. Bila Anda dilahirkan di sebuah kota tertentu dan ingin berbakti pada kota di mana anda dilahirkan, menulis tentang kota sendiri adalah paling strategis. Perlu diyakini bahwa tulisan itu berharga. Dalam sebuah kota banyak masalah yang bisa diangkat, seperti pertanahan, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, kriminalitas, dan lain-lain.

Kedekatan emosional biasanya akan diikuti atau berjalan bersamaan dengan kedekatan intelektual, bahkan tidak jarang kedekatan intelektual mendahului kedekatan emosional. Kalau tertarik terhadap permasalahan tertentu, seseorang akan memper-kaya khasanah intelektualnya dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Perlu diperhatikan, **bahaya yang akan muncul bila seseorang terlibat secara emosional ialah pertimbangan intelektualnya akan dipengaruhi emosi, sehingga sejarah berubah menjadi pengadilan.** Padahal, sejarah adalah ilmu empiris yang harus menghindari penilaian yang subjektif.

Sementara itu, Sjamsuddin (1996: 70-71) menyatakan bahwa pemilihan topik perlu memperhatikan empat kriteria sebagai berikut. *Pertama*, **nilai** bahwa topik harus sanggup memberikan penjelasan atas sesuatu yang berarti. *Kedua*, **keaslian** yaitu belum ada peneliti lain yang meneliti dan jika objek telah dikaji oleh peneliti terdahulu, maka Anda harus yakin bahwa (1) ada evidensi baru yang sangat substansial dan signifikan, (2) intepretasi baru dari evidernsi yang valid dan dapat ditunjukkan. *Ketiga*, **kepraktisan** yaitu penelitian harus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) keberadaan sumber dapat diperoleh tanpa kesulitan, (2) sumber dapat dimanfaatkan tanpa adanya tekanan, (3) kemampuan untuk memanfaatkan sumber, (4) ruang lingkup pemanfaatan (makalah, laporan, buku, thesis, dll). *Keempat*, **kesatuan** yaitu kesatuan tema yang memberikan suatu titik tolak, arah dan tujuan tertentu.

Bila dicermati, pendapat Kuntowijoyo dan Sjamsudin di atas saling melengkapi. Dengan demikian kedua pendapat tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan secara bersamaan.

A. Heuristik

Dianjurkan sebelum masuk pada tahap heuristik (pencarian dan pengumpulan sumber), peneliti melakukan studi kepustakaan dan atau perbandingan. Dengan studi kepustakaan dan atau perbandingan akan diperoleh keuntungan, yakni (1) mencapai kedalaman tentang objek atau topik serta permasalahannya; (2) kalau mungkin mendapatkan penulisan-penulisan pendahulu atau yang menyangkut topik. Peneliti harus membiasakan diri untuk mengumpulkan sumber kapan saja dan di mana saja sumber ditemukan.

Sumber sejarah dapat ditemukan di berbagai tempat sebagai berikut.

1. Perpustakaan

Dalam perpustakaan semua materi yang ada dikumpulkan, disusun, dilestarikan karena masyarakat memerlukan informasi tercatat. Melalui perpustakaan kebudayaan dikomunikasikan dan ditransmisikan kepada generasi yang akan datang. Sebelum sejarawan melakukan penelitian di arsip, disarankan lebih dahulu mengumpulkan sumber-sumber kedua berupa artikel pada jurnal atau majalah, atau buku-buku yang pernah ditulis orang tentang topik yang akan dikajinya.

2. Arsip

Sebenarnya dapat dibedakan arsip sebagai tempat penyimpanan segala macam dokumen tertulis dan arsip sebagai kumpulan dari dokumen-dokumen tertulis yang disimpan di tempat itu. Sebagai tempat, di arsip disimpan dengan teratur catatan-catatan, surat-surat, buku-buku, rekaman suara, dan materi-materi dokumen yang dibuat atau diterima dalam rangka melaksanakan hukum atau dalam hubungan dengan transaksi dagang. Sebagai tempat penyimpanan khusus, maka dikenal arsip umum (*public archives*) yaitu penyimpanan catatan-catatan dari badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga, keluarga dan individu.

Paling tidak ada dua kegunaan arsip sebagai berikut.

- a. Semula untuk selalu mengingatkan pembuatnya akan hak-hak dan kegiatan-kegiatannya serta membantu pembuatnya untuk mempertahankan hak-haknya dan merencanakan tindakan selanjutnya.

- b. Kemudian menyediakan informasi mengenai perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, dan budaya dari masa lalu (Sjamsuddin, 1996: 91).

3. Museum

Di Indonesia perkembangan museum mengarah pada kekhususan, seperti museum umum, museum militer, museum batik, museum rokok, dan lain-lain. Dewasa ini, baik di pusat maupun daerah terdapat museum yang menyimpaninggalan bersejarah. Biasanya di museum umum selain ditemukan pajangan artefak-artefak hasil temuan permukaan dan ekskavasi arkeologis, ditemukan juga manuskrip-manuskrip kuno. Semuanya dapat menjadi sumber-sumber sejarah yang penting sesuai dengan topik yang dipilih peneliti.

4. Penemuan Sumber Baru

Sumber-sumber baru sejarah secara terus menerus bermunculan. Sumber-sumber itu berupa memori, otobiografi, kumpulan surat-surat dari orang-orang sezaman yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah, peninggalan-peninggalan dan catatan-catatan penting yang dimiliki perorangan. Sumber-sumber baru itu tidak selalu mengubah substansi pengetahuan sejarah, tetapi yang pasti akan memperluas pengetahuan, akan mengisi lubang-luang yang membingungkan sejarawan, dan menghasilkan rekonstruksi yang lebih rinci dari masa lalu. Dengan penemuan sumber baru, kesalahan-kesalahan akan diperbaiki dan kebenaran masa lalu diperkuat (Sjamsuddin, 1996: 93).

B. Kritik

Apabila seorang sejarawan telah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan menjadi bahan dari cerita sejarahnya, maka langkah berikutnya yang perlu dikerjakan ialah menilai, menguji atau menyeleksi sumber-sumber tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun. Ini menyangkut kredibilitas dari sumber-sumber tersebut. Usaha ini semua disebut **kritik sejarah**.

Semua sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, oleh karena itu kritik sejarah bisa dibedakan menjadi **kritik intern** dan **kritik ekstern**. Kritik ekstern bertugas memperlakukan kesejatan bahan atau mempersoalkan apakah sumber

itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan. Kritik intern bertugas mem-permasalahkan kesejatian isi atau bertalian dengan persoalan: apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kritik ekstern terutama bertujuan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber.

1. Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, di mana sejarawan ingin mengetahui /meyakinkan diri apakah sumber itu asli atau palsu.
2. Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, yang mana terutama menyangkut sumber-sumber kuno di mana satu-satunya cara untuk memper-banyak atau mengabadikan naskah adalah dengan menyalin. Dalam menyalin inilah ada kemungkinan terjadi perubahan dari dokumen aslinya.
3. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Ini menyangkut utuh atau tidaknya sumber, artinya mempertanyakan kondisi fisik sumber (rusak, retak, robek, dll.) (Notosusanto, 1971: 20; Widja, 1988: 21-22).

Dengan kata lain, kritik ekstern harus menegakkan kesaksian, bahwa: (1) kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada waktu ini; (2) kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa ada penambahan-penambahan atau penghilangan-penghilangan (Sjamsuddin, 1996: 105).

Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; (2) membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber (Notosusanto, 1971).

Penilaian intrinsik sumber dilakukan dengan dua cara, yakni menentukan sifat sumber dan menyoroti pengarang atau pembuat sumber. Harus dapat diidentifikasi suatu sumber apakah bersifat rahasia atau tidak, bersifat sakral atau profan. Pengarang atau pembuat adalah orang yang memberikan informasi mengenai masa lampau melalui bukti yang sampai kepada kita. Untuk itu, harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya.

Untuk memastikan kesaksian dari pengarang atau pembuat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. *Pertama*, apakah ia **mampu** untuk memberikan kesaksian? Kemampuan ini antara lain berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Kemampuan itu bergantung pula pada keahliannya,

karena, misalnya, keterangan seorang prajurit mengenai jalannya sebuah rapat staf divisi, tentu perlu disangsikan nilainya. *Kedua*, apakah ia **mau** memberikan kesaksian yang benar? Ini menyangkut kepentingan si pengarang atau pembuat terhadap peristiwa itu. Harus diketahui, apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebih-lebihkannya.

Proses kedua daripada kritik intern, yaitu membanding-bandingkan kesaksian berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan “menjejerkan” kesaksian dari sumber-sumber. Untuk itu proses ini dapat dianalogkan dengan upaya seorang hakim di pengadilan dalam memeriksa saksi-saksi. Akan tetapi, sejarawan bukan sebagai hakim semata, ia juga sebagai jaksa dan pembela sekaligus.

C. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesis fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber. Analisis sendiri berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sintesis adalah upaya menyusun/menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64). Seperti dicontohkan Kuntowijoyo (1995) sebagai berikut.

- Fakta pertempuran
- Fakta rapat-rapat
- Fakta mobilisasi masa
- Fakta penggantian pejabat
- Fakta pembunuhan
- Fakta orang-orang mengungsi
- Fakta penurunan dan pengibaran bendera.

Dari fakta-fakta itu kemudian muncul interpretasi bahwa telah terjadi revolusi. Dengan demikian pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah fakta-fakta dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti mempunyai konsep, yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam (Abdurrahman, 1999: 64).

Walsh (1970) mengungkapkan, bahwa ada empat faktor yang melatar-belakangi perbedaan interpretasi sejarawan. *Pertama*, **kecenderungan pribadi** (*personal bias*),

yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Tentu banyak hal yang menyebabkan sejarawan atau siapa saja yang terlatih melakukan studi sejarah untuk menyukai atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Baik secara individu maupun kelompok. Idealnya sejarawan bebas dari kecenderungan pribadi, sehingga ia mampu menempatkan diri untuk mengambil jarak yang dapat membawanya pada sikap netral. Sikap yang tidak menyukai pelaku sejarah menyebabkan sejarawan mempunyai pertimbangan yang tidak memuaskan pada pelaku sejarah atau pada konstelasi zaman pada waktu itu. Kalau ini terjadi berarti sejarawan tidak bisa mengendalikan perasaan dan sikap semacam itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam karya sejarahnya.

Apabila seorang sejarawan telah terjebak pada rasa kagum pada pelaku sejarah tertentu, akibatnya ia akan membuat kisah sejarah terpusat pada ide-ide dan tindakan tokoh pujaannya, yang ia gambarkan sebagai faktor yang menentukan bagi konstelasi zaman pada waktu itu. Sebaliknya ahli sejarah yang lain kebetulan mempunyai perasaan anti pati yang kuat pada pelaku sejarah yang sama, maka dalam kisah sejarah yang kedua ini pelaku sejarah dilukiskan negatif, penuh ketidaksetiaan atau jahat atau tidak efektif.

Kedua, prasangka kelompok (group prejudice), yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang ahli sejarah menjadi anggota dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat oleh sejarawan yang menjadi anggota atau simpatisan kelompok tertentu sulit dideteksi, karena pandangan-pandangan kelompok itu telah diusahakan untuk diberi landasan-landasan rasional, sehingga menampilkan prasangka kelompok tertentu pada suatu karya sejarah dianggap sama saja dengan menampilkan keyakinan rasional.

Pada beberapa hal prasangka kelompok mempunyai persamaan dengan kecenderungan pribadi, tetapi ada perbedaan. Kecenderungan pribadi banyak bergantung pada selera individu, tetapi prasangka kelompok dapat berasal dari watak/karakter/ideologi kelompok. Jadi di sini bukan masalah kecenderungan lagi melainkan masalah prinsip.

Ketiga, teori teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah atau penafsiran berlainan tentang fakta sejarah (conflicting theories of historical interpretation), yaitu tafsiran yang berlainan mengenai apa yang sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini patut

diperhatikan bahwa ada teori yang telah diterima secara universal, karena teori penafsiran telah mendapat pengakuan di antara para ahli, di mana teori tersebut dianggap konklusi empiris yang tersusun di atas dasar yang kokoh dan didahului oleh penelitian-penelitian mendalam terhadap fakta-fakta dalam perkembangan sejarah. Namun demikian, masih saja terdapat kemungkinan bagi melihatnya unsur subjektivitas pada teori penafsiran ini, karena pada kenyataan tidak jarang suatu teori diberi kepercayaan yang berlebih-lebihan oleh seorang sejarawan, sampai-sampai cenderung untuk mempertahankan walaupun ia berhadapan dengan bahan bukti yang menolak teorinya.

Terhadap teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah ini harus lebih hati-hati, sebab terhadap kecenderungan pribadi dan prasangka kelompok masih ada kemungkinan besar untuk mengatasinya dengan cara menekan kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Akan tetapi, tidak mungkin menganjurkan pada sejarawan untuk melepaskan semua teori-teori penafsiran, karena memang diperlukan bekal latar belakang teori dalam rangka menjelaskan suatu peristiwa.

Keempat, pandangan filsafat yang berbeda (underlying philosophical conflicts), yaitu perbedaan dalam keyakinan moral dan metafisis. Keyakinan moral berarti penilaian-penilaian yang diberikan oleh sejarawan ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Sedang pengertian metafisis merupakan pengertian teoretis tentang hakikat manusia dari tempatnya di dalam alam semesta dengan mana penilaian itu dihubungkan. Kedua-keduanya saling terikat erat walaupun pendukung-pendukungnya tidak menyadarinya secara terbuka (Widja, 1988:44).

Sejarawan mengkaji masa lampau dengan ide-ide filosofisnya dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka menafsirkan masa lampau tersebut, sehingga menghasilkan penafsiran sejarah yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya. Jadi masalahnya di sini ialah apabila mau menghilangkan/menekan pandangan filsafat yang berbeda-beda berarti sama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan filosofis itu sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan dalam hubungannya dengan karya sejarah.

Berkaitan dengan subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah, Poespoprodjo (1987) mengingatkan, bahwa subjektivitas mempunyai pengertian lain dan tidak selalu negatif, berbeda dengan subjektivistik dan subjektivisme. Subjektivitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan subjek dan halal hukumnya. Subjektivistik lebih mengarah pada segala sesuatu yang diserahkan pada kesewenangan subjek, sedang

subjektivisme berarti objek dipandang sebagai suatu kreasi (tidak dipandang sebagaimana mestinya). Dalam hal ini objek seharusnya dipandang dengan kaca mata totalitas akal budi. Pada taraf yang ideal seorang sejarawan seharusnya tidak dihindangi subjektivistik ataupun subjektivisme.

Walaupun sejarah tidak mungkin objektif (menurut kriteria objektif mutlak), tetapi penulisan sejarah didasarkan atas aturan atau metodologi yang menjamin keobjektifannya. Ilmu sejarah mengembangkan ceritera tersendiri untuk mengukur sejauh mana pengkajiannya dinyatakan berhasil dan sejauh mana pengkajian itu gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya perlu disadari bahwa objektivitas yang berlebihan, khususnya bila maksudnya tidak pada kejujuran biasa atau keengganan menyatakan pendapat yang tegas, tidak diinginkan dalam sejarah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang masa lampau tidak bertambah, apabila sejarahnya ditulis secara ragu-ragu (Frederik dan Soeroto, 1982) . Upaya sejarawan untuk menampilkan pelaku sejarah secara jujur dan terbuka makin jauh dari objektif dan kemungkinan akan menimbulkan kekacauan secara politis maupun ilmiah.

Kalau sejarah tidak mungkin objektif secara mutlak, lantas bagaimana caranya untuk menghindari subjektivitas berlebihan dan agar sejarawan tidak terjebak dalam subjektivistik dan subjektivisme? Untuk itu Poespoprodjo (1987) menyarankan agar: (1) sejarawan terus menerus belajar agar kapasitas intelektualnya bertambah kaya. Luasnya bidang yang digarap sejarawan, jika sejarawan tidak peka terhadap bermacam ragam hal yang berasal dari berbagai bidang sektor kehidupan, maka sejarah akan menyedihkan; (2) sejarawan harus selalu memperhatikan kelengkapan kejiwaannya, hal ini penting agar sejarawan tidak (a) dipermainkan oleh prasangka, (b) dibutakan oleh konsepsi, (c) diperbudak oleh kesewenangan. Notosusanto (seperti dikutip Widja, 1988:45) menganjurkan kepada setiap sejarawan:

. Maka saya kira lebih baik kita bertolak dari kesadaran bahwa objektivitas itu tidak mungkin, bahwa mau atau tidak mau masing-masing di antara kita subjektif. Bertumpu di atas kesadaran itu kita berusaha sekeras-sekerasnya, tidak untuk bersikap objektif, melainkan untuk secara jujur mengakui subjektivitas kita dan dengan jujur berusaha bersikap adil (fair) di dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau tokoh-tokoh di dalam sejarah yang kita tuliskan kisahnya. Kepada pembaca kita, harus kita terangkan, apa sikap berat sebelah pribadi kita, apa prasangka kelompok kita, bagaimana teori interpretasi sejarah maupun filsafat hidup kita Meskipun kita tentu saja boleh mempertahankan pandangan atau tafsiran itu jangan sampai menjadi dogma. Kita harus senantiasa siap untuk mengubah atau menggantinya, jika bukti-bukti baru memaksa kita mengubah atau menggantinya.

Sutrasno (1975) berpendapat hampir sama, yaitu (1) sejarawan harus mengakui dengan teras teras segala kekurangan dan segala kemungkinan sifat subjektif dari penulisan tersebut; (2) dengan demikian pembaca dapat meneropong dan mempelajari lebih objektif.

D. Historiografi

Historiografi berasal dari *history* (sejarah) dan *graphy* (graphein : melukiskan, mencitra, menggambarkan). Historiografi berarti melukiskan atau menggambarkan sejarah atau pengertian yang lebih umum adalah penulisan sejarah.

Penulisan sejarah adalah usaha rekonstruksi hari lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang terlebih dahulu dirumuskan. Penulisan tanpa adanya penelitian tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Abdullah (1985:xv) menyatakan, bahwa penulisan adalah puncak segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah, yaitu *histoire-recite* (sejarah sebagaimana dikisahkan) yang mencoba menangkap dan memahami *histoire-realite* (sejarah sebagaimana terjadi-nya). Hasil pengerjaan sejarah yang akademis atau kritis berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta.

Dalam melakukan pemaparan, penulis sejarah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut.

1. Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan bahasa secara baik. Misalnya, memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan memilih kata serta gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud.
2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum.
3. Diperlukan pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan agar mudah diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.
4. Pemaparan harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau didasarkan bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman dalam Abdurrahman, 1999: 67-68).

Menurut Kartodirdjo (1992: 60-62) penulisan sejarah harus mengikuti beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis, dari awal sampai akhir.

2. Dari kelompok fakta (peristiwa) perlu ada penentuan fakta kausal (penyebab), fakta (peristiwa), dan fakta akibat. Sering ada juga multikausalitas atau kondisi-kondisi dari situasi yang menciptakan “kemasakan” situasi bagi terjadinya peristiwa.
3. Bila uraian berupa deskriptif-naratif, maka perlu ada proses serialisasi, ialah mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas.
4. Dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara simultan (bersama) sudah barang tentu dituturkan secara terpisah.
5. Apabila satu peristiwa sangat kompleks, terjadi atas banyak kejadian kecil, maka perlu diseleksi mana yang perlu disoroti karena dipandang penting.
6. Unit waktu dan unit ruang dapat dibagi-bagi atas sub-unit tanpa menghilangkan kaitannya atau dalam kerangka umum suasana terjadinya.
7. Untuk memberi struktur kepada waktu, maka perlu dilakukan priodisasi (pembabakan) waktu berdasarkan kriteria tertentu, seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu.
8. Suatu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atas episode-episode, seperti: gerakan sosial, mengalami masa awal penuh dengan keresahan sosial, munculnya pemimpin dan ideologi, masa akselerasi konflik, konfrontasi, dan masa reda.
9. Perkembangan ekonomi sering memperlihatkan garis pasang-surut, semacam gelombang yang lazim disebut konjunktur. Di samping itu, perubahan sosial makan waktu lebih lama sebelum tampak jelas perubahan strukturalnya. Perubahan yang radikal, total, dan mendesak lebih tepat disebut revolusi. Perkembangan historis mempunyai iramanya sendiri, secara esensial berbeda dengan perkembangan evolusioner menurut teori evolusi.
10. Dalam perkembangan metodologi sejarah mutakhir ternyata pengkajian sejarah tidak lagi semata-mata membuat deskriptif-naratif, tetapi lebih banyak menyusun deskripsi analisis.

BAB VI

PENUTUP

Bangunan keilmuan sejarah ditopang oleh konsep-konsep, seperti waktu, ruang, manusia, peristiwa, *einmalig*, dan kausalitas. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, maka orang akan mudah membuat definisi sejarah. Seorang guru sejarah sebaiknya tidak mengharuskan siswa-siswanya untuk menghafal suatu definisi sejarah dari sejarawan tertentu, tetapi hendaknya menjelaskan konsep-konsep dan biarkan siswa menyusun definisi sendiri dengan mengacu pada konsep-konsep tersebut.

Di samping itu, terdapat pengertian yang bersifat “menolak” yaitu sejarah bukan mitos, sejarah bukan sastra, sejarah bukan filsafat, dan sejarah bukan ilmu alam.

Dimensi sejarah dapat menyentuh kawasan ilmu, seni, peristiwa dan kisah. Sebagai ilmu, sejarah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, seperti memiliki objek, tujuan, metode, kegunaan, sistematika, kebenaran, generalisasi, dan prediksi. Sebagai ilmu tentang manusia, sejarah mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu alam. Sejarah sebagai seni karena sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Sejarah sebagai peristiwa menunjukkan pada apa yang benar-benar terjadi. Peristiwa ini meninggalkan bukti-bukti. Jejak atau bukti ini selanjutnya dianalisis, diberi interpretasi kemudian menghasilkan sejarah sebagai kisah.

Terdapat berbagai klasifikasi tentang sumber sejarah, seperti sumber yang sengaja dan tidak sengaja ditinggalkan; sumber langsung dan tidak langsung; sumber historis dan non historis; sumber tertulis, benda, dan lisan; sumber primer dan sekunder.

Aktivitas manusia pada masa lampau amat beragam, untuk itu perlu disederhanakan agar memudahkan pengkajian dan memahami persoalan bagian demi bagian. Di samping ini penyusunan periodisasi diperuntukkan memenuhi persyaratan sejarah sebagai ilmu. Kriteria yang biasa dipakai dalam menyusun periodisasi adalah kronologis, dinasti, integrasi, ketatanegaraan, ekonomi, dan agama. Penyusunan periodisasi hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu harus diiringi waktu, menggunakan tahun bulat atau abad, dan penggunaan kriteria secara konsisten.

Prosedur penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber. Kritik merupakan upaya mempertanyakan kesejatan (otentisitas dan kredibilitas) sumber. Interpretasi merupakan kegiatan sintesa dari fakta-fakta yang berhasil ditemukan. Historiografi adalah puncak kegiatan intelektual sejarawan yang berupa penulisan hasil sintesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historio-grafi. Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia. Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Poespoprodjo, W. 1987. *Subjektivitas Dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Karya.
- Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrasno. 1975. *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widja, I.G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- 2002. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Zed, Mestika. 2002. Beberapa Catatan Tentang Epistemology Sejarah. Dalam Sunaryo Purwo Sumitro. *Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta. Persembahkan Kepada Teuku Ibrahim Alfian*. Jakarta: MSI dan Sinergi Press.